BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Kebijakan mengenai Penataan dan Pemberdayaan PKL di Kawasan Taman Pinang menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012, Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016, dan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 23 Tahun 2014 belum terimplementasi karena lokasi yang dijadikan sebagai lahan berdagang oleh pedagang kaki lima masih illegal. Kenyataannya lahan tersebut masih kepemilikan pengembang perumahan, belum diberikan oleh Pemerintah dan bukan jalan umum sehingga para pedagang kaki lima seharusnya tidak menempati kawasan Taman Pinang, tetapi dengan melihat ramaianya pengunjung dan tempat yang strategis, para pedagang kaki lima masih bertahan menempati kawasan Taman Pinang meskipun diusir oleh Satpol PP, bahkan mendapatkan penolakan dari warga Perumahan Taman Pinang Indah.
2. Kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL yang tertuang di Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 tahun 2016 dan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 23 tahun 2014 lebih memberikan hasil yang positif kepada para PKL karena mereka sudah ada yang mengatur, jika ada yang ketidaksesuaian antara peraturan dan realitanya, maka Pemerintah bersikap

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

transparan dan terbuka untuk menerimanya. Sedangkan hasil yang diperoleh dari implementasi kebijakan tersebut terhadap warga Taman Pinang terdapat dua kelompok yaitu kelompok warga yang setuju dan kelompok tidak setuju adanya PKL di kawasa Taman Pinang. Kelompok warga setuju adanya PKL karena mereka dimudahkan dalam pemenuhan kebutuhan dan harga yang terjangkau, sedangakan warga yang tidak setuju adanya PKL karena jalanan yang dijadikan lahan berdagang para PKL menjadi semrawut atau tidak beraturan, macet sehingga mengganggu akses keluar masuk warga perumahan, serta kebersihan menjadi berkurang pasalnya bekas jualan mereka dan tempat jualan berada di tempat yang tidak semestinya.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang ada dari hasil penelitian ini maka peneliti mengajukan untuk peneliti selanjutnya adalah dapat membuktikan adanya program atau kebijakan Pemerintah Sidoarjo untuk mencari solusi terhadap para pedagang kaki lima yang berada di kawasan Taman Pinang dan jika sudah di relokasi maka dibuktikan juga kebijakan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima yang tertuang di peraturan pemerintah sudah terimplementasi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id